

Implementation of the Swadaya Housing Stimulant Assistance Program for Low-Income Communities in Rana Masak Village, Borong District

Kostarius Baldor^{1*}, Fransina W. Ballo², Cicilia A. Tungga³
Nusa Cendana University

Corresponding Author: Kostarius Baldor Costabaldor04@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Swadaya, Housing Stimulant Assistance, Implementation

Received : 2 September
Revised : 17 September
Accepted: 17 October

©2023 Baldor, Ballo, Tungga: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This thesis is entitled implementation of a self-help housing stimulant assistance program for low-income communities in Rana Masak village, Borong sub-district. Housing assistance is a policy in overcoming the problem of poverty, especially in resolving the problem of providing housing for people who have houses that are uninhabitable. As a responsibility of the government, regulations have been issued relating to the fulfillment of housing, namely Swadaya housing stimulant assistance (BSPS). This research uses qualitative methods with qualitative descriptive analysis. As with qualitative methods, researchers will analyze using field research, namely researchers conducting interviews, observations and documentation related to the implementation of this housing assistance program. This research was carried out in order to determine whether the implementation of this housing program was going well or not. This research was carried out in Rana Masak village, Borong sub-district because one of the villages that received housing assistance was Rana Masak village. Based on four aspects in determining the success of implementing a policy, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure, there are still deficiencies and obstacles faced, in this case the insufficient housing assistance budget. This is indicated by the construction of houses in Rana Masak Village where there are still people who are categorized as uninhabitable houses and there is a lack of budget in the construction process as a result of which the community does not receive aid evenly

Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Desa Rana Masak Kecamatan Borong

Kostarius Baldor^{1*}, Fransina W. Ballo², Cicilia A. Tungga³

Universitas Nusa Cendana

Corresponding Author: Kostarius Baldor Costabaldor04@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Swadaya, Bantuan Stimulan Perumahan (BSPS), Implementasi

Received : 2 September

Revised : 17 September

Accepted: 17 October

©2023 Baldor, Ballo, Tungga: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Desa Rana Masak Kecamatan Borong. Bantuan perumahan merupakan suatu kebijakan dalam mengatasi masalah kemiskinan, khususnya dalam menyelesaikan masalah penyediaan perumahan bagi masyarakat yang mempunyai rumah tidak layak huni. Sebagai tanggung jawab pemerintah, telah diterbitkan peraturan terkait pemenuhan perumahan yaitu bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Sama halnya dengan metode kualitatif, peneliti akan menganalisis dengan menggunakan penelitian lapangan yaitu peneliti melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi terkait dengan pelaksanaan program bantuan perumahan ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program perumahan ini berjalan dengan baik atau tidak. Penelitian ini dilakukan di Desa Rana Masak Kecamatan Borong karena salah satu desa yang menerima bantuan perumahan adalah Desa Rana Masak. Berdasarkan empat aspek dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, masih terdapat kekurangan dan kendala yang dihadapi, dalam hal ini anggaran bantuan perumahan tidak mencukupi. Hal ini ditandai dengan pembangunan rumah di Desa Rana Masak yang masih terdapat masyarakat yang masuk dalam kategori rumah tidak layak huni dan kurangnya anggaran dalam proses pembangunannya sehingga mengakibatkan masyarakat tidak menerima bantuan secara merata

PENDAHULUAN

Pemenuhan kebutuhan primer sangat penting bagi masyarakat oleh karena itu kebijakan publik sangat menentukan arah kehidupan masyarakat kedepannya. Kebijakan publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga sebagai tindak lanjut dalam menjawab masalah yang terjadi di masyarakat maupun berkaitan dengan evaluasi dari kebijakan itu sendiri. Kebijakan mengenai penyediaan perumahan yang layak huni sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang di kategorikan sebagai masyarakat miskin atau masyarakat yang berpendapatan rendah. Efektifitas pengelolaan program bantuan perumahan ini berkaitan dengan suatu lembaga maupun objek dari bantuan itu sendiri. Oleh karena itu peran maupun tanggung jawab dari lembaga yang berkaitan maupun partisipasi dari objek suatu kebijakan sangat penting dalam menyukseskan suatu kebijakan publik. . Perkembangan Masyarakat membawa dampak dan kebutuhan yang banyak. Kebijakan publik hadir dalam rangka mengatasi masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Apabila kebijakan yang ada tidak sesuai dengan masalah yang ada di masyarakat maka muncul ketidak puasan dalam masyarakat. Pertimbangan maupun perencanaan dalam sebuah kebijakan sangat penting di lakukan karena kebijakan publik bukan hanya sekedar ada dan di lakukan tetapi kebijakan publik berkaitan dengan hasil akhir maupun pencapaian dari suatu kebijakan. Masalah yang ada di masyarakat menjadi jawaban dari pelaksanaan dari suatu kebijakan apabila kebijakan publik tidak mampu menjawab masalah tersebut maka muncul ke tidak puasan yang ada dalam masyarakat.

Tabel 1. Persebaran Rumah Tidak Layak Huni di Manggarai Timur Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah RTLH (Unit)	Rumah Tangga (KK)
Borong	1.623	10.082
Rana Mese	2.170	6.655
Poco Ranaka Timur	1.776	6.943
Lamba Leda	2.400	8.200
Kota Komba	2.153	12.195
Elar	1.551	3.829
Elar Selatan	1.409	4.373
Sambi Rampas	1.994	7.063
Poco Ranaka	2.396	8.495
Jumlah	17.639	67.835

Sumber: Dinas Perumahan Kabupaten Manggarai Timur 2020

Dari data dinas perumahan Manggarai Timur persebaran rumah tidak layak huni berada di setiap Kecamatan Borong yaitu 1.623. Jika di evaluasi sasaran program bantuan stimulan perumahan swadaya tahun 2021 sebanyak 75 unit rumah diberikan kepada tiga desa di Kecamatan Borong Manggarai Timur tetapi menurut persebaran jumlah rumah tidak layak huni per Kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur salah satunya di Borong terdapat 1.623 dari dinas perumahan Kabupaten Manggarai Timur 2020.

Tabel 2. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Borong Tahun 2021

Kelurahan/Desa	Pengusulan dan Penetapan Lokasi	Penetapan SK Penerima
Waling	25	25
Golo Leda	25	25
Rana Masak	25	25

Sumber: Laporan Tahunan PUPR Bantuan Perumahan 2021

Artinya jumlah rumah tidak layak huni tidak sebanding dengan bantuan yang di terima. Sebagai acuan lanjutan dalam penelitian ini penulis mengambil objek analisisnya yaitu di Kabupaten Manggarai Timur tepatnya di Kecamatan Borong di Desa Rana Masak. Alasan mengapa peneliti mengangkat masalah ini karena persebaran rumah tidak layak huni Kabupaten Manggarai Timur sangat banyak yaitu 17.639 unit rumah dan pada tahun 2021 alokasi bantuan perumahan di berikan yaitu 75 unit rumah di tiga Desa di Kecamatan Borong dan menurut persebaran jumlah rumah tidak layak huni di borong sangat banyak yaitu sebesar 1.623 unit rumah. Peneliti memilih Desa Rana Masak dari tiga desa yang menerima bantuan perumahan karena lokasi penelitian dekat dengan dinas perumahan Manggarai Timur dan juga dekat dengan tempat tinggal peneliti. Penulis tertarik untuk menganalisis masalah tersebut dengan judul "Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Terhadap Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa Rana Masak Kecamatan Borong".

TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan masalah yang sering di hadapi Negara berkembang khususnya Negara Indonesia. Masalah kemiskinan bukan hanya berkenaan dengan keadaan ekonomi masyarakat kusunya berkaitan dengan financial tetapi juga masalah kemiskinan berkaitan dengan kebutuhan akan perumahan. Pemenuhan akan perumahan sangat penting dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan. Sebagai perwujudan sikap dan tanggung jawab dari pemerintah terkait masalah pemenuhan kebutuhan akan perumahan maka di keluarkanyalah peraturan menteri No 27 Tahun 2012 tentang pengadaan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas melalui KPR bersubsidi. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman telah diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tersebut diamanatkan tentang

penyelenggaraan perumahan swadya oleh pemerintah Persebaran jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) tersebar di beberapa Kecamatan di Manggarai Timur.

METODOLOGI

Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara observasi maupun dokumentasi terkait pelaksanaan bantuan perumahan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan data lewat wawancara maupun observasi untuk mengetahui sejauh mana implementasi dari program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Desa Rana Masak Kecamatan Borong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi dapat dimulai melalui kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil menurut Edward III (Subarsono, 2011: 90-92) ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu komunikasi (communications), sumberdaya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Empat faktor di atas harus dilaksanakan secara stimulan karena antara satu dengan lainnya memiliki keterkaitan yang kuat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan publik secara sederhana dapat di artikan sebagai proses perencanaan sampai kepada tindakan suatu program. Keberhasilan dari implementasi suatu program dapat dilihat dengan hasil atau tercapainya tujuan dari program itu sendiri. Dalam menjalankan suatu program perlu adanya komunikasi maupun interaksi yang jelas dan terukur agar bisa terealisasi dengan baik. Bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS merupakan bantuan yang bersifat stimulan. Bantuan perumahan ini merupakan bantuan yang di berikan bagi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni serta berpenghasilan rendah. Bantuan ini di berikan sebagai dorongan bagi masyarakat agar membangun rumah yang layak.

Pelaksanaan bantuan perumahan ini memiliki pedoman yang tertuang dalam peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat No 13/PRT/2016. Peraturan ini menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan program bantuan perumahan. Dengan adanya peraturan menteri ini tiap aktor dalam pelaksanaan suatu kebijakan hendaknya memperhatikan efektifitas maupun ketertipan dalam pengelolaan suatu kebijakan. Dalam pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Rana Masak Kecamatan Borong peneliti menemukan informasi yang penting berkaitan dengan analisis tentang pelaksanaan program ini. Dimana, pemerintah desa dan juga tim fasilitator sangat berperan aktif dalam menyampaikan informasi dalam hal ini adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait program bantuan stimulan perumahan swadaya. Walaupun sudah di berikan sosialisasi masih ada masyarakat yang tidak siap dalam pelaksanaan pembangunan perumahan. Berdasarkan hasil penelitian yang di temui peneliti masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi yang di berikan oleh tim fasilitator.

Sumber Daya berhubungan dengan sumber daya manusia dan juga sumber daya non manusia dalam hal ini adalah finansial. Ketersediaan sumber daya manusia berhubungan dengan peran fasilitator, Aparat desa maupun penerima manfaat itu sendiri. Peran pelaksana kebijakan itu sendiri menyangkut tanggung jawab terhadap peran dan tugas untuk melaksanakan suatu kebijakan. Hasil pengamatan peneliti terkait program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) khususnya dalam hal sumber daya dimana berdasarkan peraturan pekerjaan umum dan perumahan rakyat No 13/PRT/2016 aparat desa, masyarakat maupun tim fasilitator melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman peraturan menteri PUPR. Peraturan ini menjadi landasan dalam pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya oleh karena itu sumber daya manusia dalam hal ini adalah masyarakat, aparat desa maupun tim fasilitator berkoordinasi dengan baik dan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan tersebut.

Tanggungjawab merupakan aspek yang di nilai dalam aspek disposisi. Sesuai dengan ketentuan peraturan menteri No 13/PRT/2016 tugas fasilitator sangat penting dalam pendampingan penerima manfaat bantuan stimulan perumahan swadaya. Disposisi menunjukkan bagaimana tanggungjawab pihak yang melaksanakan program bantuan stimulan perumahan swadaya. Pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya yang terjadi di Desa Rana Masak berjalan cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti tanggungjawab tiap aktor dalam hal ini adalah peran pemerintah Desa, masyarakat dan juga fasilitator bertugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kesuksesan pelaksanaan suatu program sangat bergantung pada optimalisasi peran tiap aktor pemerintahan maupun masyarakat.

Struktur organisasi dalam pengelolaan bantuan perumahan berkaitan dengan instansi dalam pengelolaan sampai suatu kebijakan di rasakan oleh masyarakat dalam hal ini adalah bantuan perumahan. Pengelolaan dan struktur yang jelas sangat menentukan arah kebijakan itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian peneliti mekanisme dalam pengelolaan bantuan perumahan tersebut sudah terstruktur dengan baik sehingga kebijakan mengenai bantuan perumahan tepat sasaran. Hal yang mendukung pencapaian program bantuan perumahan ini yaitu aparat desa melakukan pendataan terkait rumah yang tidak layak huni. Sehingga bantuan yang di salurkan tepat sasaran.

Masyarakat yang lolos dari tahap verifikasi setelah aparat desa melakukan pendataan akan menerima bantuan sesuai dengan persyaratan dari pusat. Dari ke empat aspek dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program bantuan perumahan tersebut aspek sumber daya masih mengalami kendala dalam hal ini adalah kekurangan anggaran. Sebagai masyarakat yang ada di desa rana masak menolak dan pada saat pembangunan masih menghadapi kendala. Oleh karena itu peningkatan anggaran dalam menuntaskan masalah kemiskinan terutama dalam pemenuhan akan perumahan lebih di tingkatkan lagi agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan akan perumahan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Rana Masak Kecamatan Borong belum sepenuhnya berjalan. Berdasarkan empat aspek dalam penentuan keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan yaitu Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi masih ada kekurangan dan kendala yang di hadapi dalam hal ini adalah anggaran bantuan perumahan yang kurang. Hal ini di tandai dengan pembangunan rumah di Desa Rana Masak yang masih ada masyarakat yang di kategorikan sebagai rumah yang tidak layak huni dan kekurangan anggaran dalam proses pembangunan akibatnya masyarakat tidak menerima bantuan secara merata. Koordinasi antara pemerintah desa, masyarakat dan tim fasilitator dari aspek sikap dan tanggungjawab sebagai pelaksana, pengelolaan sumber daya finansial yang efisien, struktur pelaksanaan kebijakan yang jelas sudah berjalan secara optimal. Dari hasil penelitian dan pengamatan peneliti menunjukkan bahwa koordinasi pemerintah dengan masyarakat mengambil peran sesuai dengan tugasnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan peneliti terhadap pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya yang perlu untuk di tingkatkan lagi yaitu:

1. Bantuan perumahan perlu di tingkatkan lagi berkaitan dengan peningkatan anggaran dana bantuan untuk pembangunan rumah. Berdasarkan perbandingan anggaran bantuan perumahan pada tahun 2022 yaitu sebesar 4,016 Triliun sedangkan pada tahun 2023 hanya 3,29 Triliun. Oleh karena itu untuk anggaran pembangunan rumah perlu di tingkatkan lagi pada tahun 2024. Karena berdasarkan penelitian peneliti masih banyak masyarakat yang mengeluh tentang ukuran rumah yang terlalu kecil karena anggaran untuk pemblanjaan material yang sedikit.
2. Bantuan stimulan perumahan swadaya perlu di tingkatkan lagi. Peningkatan anggaran di lakukan dengan mengubah Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 115 /KPTS/M/2022 Tentang Besaran Nilai Dan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dengan perincian Reguler di luar Papua dan Papua Barat di naikan menjadi 30 Juta yang sebelumnya hanya 20 Juta Karena sesuai dengan pendataan rumah tidak layak huni yang ada di Kecamatan Borong Desa Rana Masak masih terdapat sejumlah penolakan bantuan perumahan BSPS karena masyarakat menganggap anggaran pembangunan rumah kurang cukup bukan hanya itu masyarakat yang menerima bantuan tersebut juga mengalami kendala dalam pembangunan rumah oleh karena itu masyarakat penerima manfaat sebagian menjual tanah untuk melanjutkan pembangunan rumah.
3. Bagi peneliti selanjutnya di harapkan menggabungkan lebih banyak teori dalam melihat keberhasilan dari pelaksanaan suatu kebijakan dan menggunakan alat analisis untuk mengukur efektifitas dan pengelolaan yang mempunyai korelasi dengan keberhasilan pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya sehingga memperoleh hasil yang lebih akurat.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait topik Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya terhadap Masyarakat Berpendapatan Rendah, demi menyempurnakan penelitian ini dan menambah wawasan bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burham. (2017). *Penelitian Kualitatif (Edisi Kedua)*. Jakarta: Kencana.
- Digdowniseiso, Kumba. 2019. *Teori Pembangunan*. Jakarta Selatan Lembaga Penerbitan Universitas Nasional.
- Direktorat Rumah Swadaya Direktorat Jendral Perumahan, 2021. *Persiapan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Hadari, Nanawi. 1987. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif : Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Pres Jakad Media Publishing.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2020. *Profil SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi NTT*, Jakarta: Kementerian PUPR.
- Lexy J, Moleong. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Maryadi, dkk. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi FKIP*. Surakarta: BP-FKIP UMS
- Miles, Huberman dan Saldana. 2014. *Qualitative Data Analisis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Pres.
- Nugroho, Riant. 2021. *Kebijakan Publik Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*, Komputindo: Elex Media.
- Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Suharsimi, Arikunto. 1992. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka.